

## Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Ekowisata dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah (Studi pada Destinasi Wisata Gombongsari Kabupaten Banyuwangi)

Auliya Gaffar Rahman; Nuri Hidayati<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Universitas Bakti Indonesia, Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article history:

Dikirim tanggal: 15 November 2022 Revisi pertama tanggal: 28 Desember 2022 Diterima tanggal: 30 Desember 2022 Tersedia online tanggal: 24 Mei 2023

*Keywords: implementation, development, ecotourism-based, Gombongsari*

### ABSTRACT

This study focuses on 3 main aspects in the implementation of ecotourism-based tourism policies in Gombongsari, Banyuwangi Regency. This research limits itself to pre-pandemic implementation studies. From the theoretical aspect, this study uses Edward III theory as the main reference theory. This research uses descriptive-qualitative research methods. Primary data sources are interview results and secondary data sources are documents. data analysis techniques using Miles and Huberman data analysis. The results obtained show that there are several obstacles such as the absence of monitoring and evaluation of training programmes by Disbudpar Banyuwangi Regency, low operational budgets in regional tourism development. But in general, the implementation that occurs is good, manifested in the form of tourism development both tourist destinations and tourist support industries.

### INTISARI

Kajian ini memfokuskan pada 3 aspek utama dalam implementasi kebijakan pariwisata berbasis ekowisata di Gombongsari Kab. Banyuwangi. Penelitian ini membatasi pada studi implementasi sebelum pandemi. Dari aspek teoritis, penelitian ini menggunakan teori Edward III sebagai teori rujukan utama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Sumber data primer adalah hasil wawancara dan Sumber data sekunder adalah dokumen. teknik analisis data menggunakan analisis data Miles and Huberman. Hasil yang didapat bahwa terdapat beberapa kendala seperti belum adanya monitoring dan evaluasi program diklat oleh Disbudpar Kab. Banyuwangi, anggaran operasional yang rendah dalam pengembangan pariwisata daerah. Namun secara umum implementasi yang terjadi sudah baik, diwujudkan dalam bentuk pengembangan pariwisata baik destinasi wisata maupun industri pendukung wisata.

2019 FIA UB. All rights reserved.

### 1. Pendahuluan

pengembangan pariwisata di Gombongsari, Kab. Banyuwangi mengacu pada UU 10/2009 yang kemudian dijabarkan ke dalam UU 50/2011 dan Perda Kab. Banyuwangi 13/2012. Konsep pengembangan pariwisata Kab. Banyuwangi dilakukan melalui beberapa WPP terpadu, salah satunya adalah melalui pengembangan pariwisata *Diamond Triangle* atau segitiga berlian. Konsep WPP Banyuwangi terbagi menjadi 3, yaitu WPP

I meliputi Kawah Ijen, WPP II Sukomade, dan WPP III Taman Nasional Alas Purwo.

Sebagai contoh implementasi pengembangan pariwisata di Kab. Banyuwangi berada di WPP I zona Kawah Ijen, yaitu Kelurahan Gombongsari yang terletak di Kecamatan Kalipuro. Kelurahan tersebut terkenal dengan potensi tanaman kopi dan telah diwujudkan dengan keberadaan wisata edukasi kebun kopi. Selain wisata kebun kopi, juga tersedia wisata edukasi perah kambing etawa dan destinasi wisata alam lainnya.

Dengan berbagai wahana yang telah ada, tampak atraksi wisata yang ada belum dikelola dengan baik. Hal tersebut praktis menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat Kel. Gombengsari ditengah perkembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Kurangnya dukungan dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan faktor-faktor lain seperti kualitas SDM; keterbatasan alat produksi modern; dan minimnya sarana prasarana pendukung pariwisata.

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu, diantaranya Alikulova (2014) masalah proses implementasi *tourism local implementation* dalam meningkatkan perekonomian setempat di Kab. Banyuwangi memerlukan telaah dan pemantauan yang berkesinambungan serta konsisten. Kemudian dari Dalonso et al (2014) keberhasilan pengembangan pariwisata terletak pada pengemasan atraksi melalui rangkaian acara yang menarik, serta dibutuhkan keterlibatan peran aktor didalamnya, hal ini pemerintah Kab. Banyuwangi harus terlibat dalam proses pengembangan wisata tersebut. Kemudian Hwang dan Lee (2014) yang menegaskan bahwa implementasi kebijakan RRTV di Desa yang berada di Korea Selatan berdampak sangat signifikan terhadap pariwisata pedesaan, tentunya pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu membuat kebijakan yang dapat memaksimalkan potensi wisata di daerah pedesaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui keterlibatan Pemerintah kab. Banyuwangi dan Kel. Gombengsari dalam menggerakkan kesadaran masyarakat untuk mengaktualisasi potensi yang dimiliki Desa Gombengsari sehingga mampu meningkatkan nilai ekonomi Kelurahan Gombengsari.

## 2. Teori

### 2.1. Kebijakan Publik

Kajian literatur implementasi kebijakan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Edward III (1980). Pendekatan Edward III (1980) menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat melalui dua faktor utama, yaitu faktor pendukung dan penghambat implementasi. Kemudian kedua faktor tersebut, Edward III (1984) menjabarkan menjadi empat faktor utama yaitu: komunikasi; sumber daya; sikap pelaksana (pemerintah/birokrasi); dan struktur organisasi.

### 2.2. Implementasi Pengembangan Pariwisata

Sedangkan untuk implementasi pengembangan pariwisata berbasis ekowisata dalam meningkatkan ekonomi daerah mengacu kepada beberapa literatur yaitu, pertama, Alikulova (2014) menekankan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata di KazakhstanTurki yaitu dengan proses penilaian dan

konsisten dalam perbaikan sarana prasarana/infrastruktur, promosi wisata, serta perbaikan kualitas pelayanan serta perlu adanya pembuatan peraturan di tingkat regional. Kemudian dari Dalonso et al (2014) dan Agiomirgianakis et al (2017) menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata terletak pada kebijakan terkait pengemasan kegiatan dan keterlibatan aktor yang terlibat dalam pembuatan master plan kebijakan pariwisata (Bulin, 2015). Kemudian dari Hwang dan Lee (2014) yang menekankan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata berbasis ekowisata didaerah tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang pro terhadap lingkungan dan potensi yang dimiliki daerah tersebut.

### 2.3. Peningkatan Ekonomi Daerah

Sedangkan dari segi peningkatan ekonomi daerah, Oktavilai (2011); Andriyani et al (2012); dan Utama (2016) menegaskan bahwa keberadaan pariwisata di suatu daerah seperti di Jawa Tengah; Kepulauan Sikakap dan Bali, berpengaruh terhadap perubahan struktur ekonomi daerah maupun masyarakat daerah tersebut. cenderung tidak efisien karena masing masing individu pada dasarnya memiliki insentif untuk menjadi penumpang atau free riders dari kerja individu yang lain dalam kelompok. Oleh karena itu Olson berpendapat bahwa hanya sebuah insentif yang selektif yang akan menstimuli seorang individu yang rasional di dalam kelompok yang tersembunyi untuk bertindak sesuai dengan orientasi pada kelompok tersebut. Olson selanjutnya mengemukakan konsep tentang interorganizational system yang menjelaskan bahwa *free riders* dapat dikurangi melalui efisiensi kelompok, sistem insentif dan kontrol terhadap akses barang publik.

## 3. Metode Penelitian

Pengumpulan data ini menggunakan deskriptif-kualitatif. Sumber data utama berasal dari informan yang terdiri dari pemerintah Kab. Banyuwangi Kepala Kel. Gombengsari, Ketua Pokdarwis Kel. Gombengsari, Pengurus Pokjawis Gombengsari. Sumber data sekunder menggunakan dokumen (RPJMD) Kab. Banyuwangi dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014) meliputi *consensation data; display data; dan conclusion: drawing and verification..*

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 4.1. Implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di Kab. banyuwangi

#### 4.1.1. Komunikasi

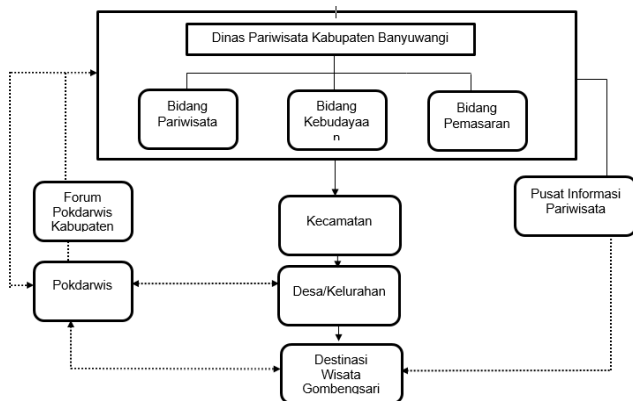
Pengembangan dan pengelolaan pariwisata di kel. Gombengsari di kelola secara mandiri oleh penduduk setempat. Model *development of tourism policy* yang

dilakukan kab. banyuwangi adalah melalui development approach berbasis penduduk lokal, yaitu dengan melibatkan langsung penduduk setempat dalam setiap kegiatan pariwisata, seperti atraksi dan pengelolaan.

Disparbud selaku *leading sector* pada proses *tourism destination development* selalu melakukan komunikasi 2 arah dengan Desa/Kelurahan yang menjadi obyek pengembangan wisata. Komunikasi 2 arah dimaksudkan agar terjalin kondisi yang berkesinambungan dan kondusif. Serta terwujudnya harmonisasi dalam proses implementasi kebijakan.

Bentuk komunikasi antara Dispar dengan Kel. Gombengsari dilakukan secara face to face maupun pertemuan terstruktur. Dalam acara tersebut, penduduk lokal diberikan hak untuk memberikan pendapat/aspirasi terkait permasalahan yang ada di Kel. Gombengsari.

Selain itu, Dispar juga rutin berbincang dengan Pokdarwis Gombengsari terkait sosialisasi secara inklusif terkait implementasi kebijakan, berupa pemahaman terkait arti penting menjaga dan melestarikan potensi pariwisatanya. Potensi yang dimiliki Gombengsari memberikan nilai manfaat, khususnya pada bidang ekonomi. Adapun pola komunikasi antara Dispar dengan Kel. Gombengsari dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Alur Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Kabupaten Banyuwangi dengan Kelurahan Gombengsari

Sumber: Olahan Peneliti 2020

Pada gambar 1 ditelaah bahwa komunikasi pengembangan potensi pariwisata di Gombengsari antara Dispar dengan Pemerintah Kel. Gombengsari terlaksana dengan baik. Dialog 2 arah dilakukan secara face to face di hotel-hotel maupun di Dispar Kab. Banyuwangi. Minat penduduk setempat dirasa sangat antusias, yaitu ditunjukkan dengan mengutarakan permasalahan mereka yang ada di pariwisata kel. Gombengsari. Mereka melakukan diskusi untuk mencari solusi atas kendala yang terjadi. Agenda pertemuan seperti ini biasanya dilakukan 1 bulan sekali.

#### 4.1.2. Sumber daya manusia; anggaran; sarana prasarana; dan kewenangan

Sumberdaya pegawai Dispar dan Kel. Gombengsari bisa dikatakan belum ideal, karena sebagian pegawai merupakan lulusan SMA sederajat. Seturut itu, sebagian pegawai Dispar belum memiliki keahlian di bidang pariwisata. Tentunya hal tersebut dikhawatirkan dapat menghambat setiap tugas yang dilaksanakan. Maka dari itu, beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan SDM Dispar dan Kel. Gombengsari, yaitu dengan mendatangkan para ahli dibidang pariwisata untuk memberikan edukasi dan pelatihan terkait pengelolaan potensi wisata dan mendorong UMKM di daerah tersebut.

Sedangkan dari sisi sumber daya anggaran Dispar dirasa sudah mencukupi karena anggaran berasal dari APBD dan sudah di distribusikan ke masing-masing pos. Sedangkan sumberdaya anggaran di Kelurahan Gombengsari bersumber dari APBD dan dana swadaya masyarakat belum ada bantuan dari pihak pemerintah, terutama dari Dispar kab. Banyuwangi.

Kemudian dari sisi sumber daya sarana prasarana di Kel. Gombengsari, hingga saat ini terus berbenah diri untuk menghadirkan sarana prasarana yang ideal dan proses pengadaan sarana prasarana ini dilakukan dengan kegiatan musrembang dan pembangunan fisik (lihat gambar 2) seperti pembangunan Rumah Kreasi Kopi, sebagai salah satu sarana prasarana wisata di Kel. Gombengsari



Gambar 2. Contoh proses pembangunan sarana dan prasarana destinasi wisata Gombengsari

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2020

Terakhir, sumber daya kewenangan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Pariwisata melakukan kewenangannya dengan melakukan pengembangan jaringan kemitraan, yaitu melakukan kerjasama dengan agen-agen pariwisata yang tersebar di kab. Banyuwangi.

#### 4.1.3. Struktur birokrasi

Secara struktur birokrasi, pemerintah melalui Dinas Pariwisata telah berupaya untuk memaksimalkan kinerja instansinya. Struktur birokrasi Dispar terdiri dari 3 bidang yaitu bidang pariwisata, kebudayaan, dan pemasaran, yang memiliki tupoksi dan tugas yang berbeda-beda sesuai beban kerja bidang tersebut.

Kemudian pada tingkat kecamatan diwakili oleh Kec. Kalipuro. Sedangkan pada tingkat paling bawah diwakili oleh pemerintah Kel. Gombengsari yang bertindak sebagai pembina serta mitra pokdarwis di tingkat kelurahan.

#### 4.1.4. Disposisi

Salah satu bentuk disposisi yang dilakukan pihak pemerintah kepada Kelurahan Gombengsari adalah meningkatkan mutu SDM para aktor wisata di Kel. Gombengsari. Peningkatan mutu ini dilakukan melalui pembinaan pokdarwis setempat, yang merupakan pelaku usaha di Kel. Gombengsari. Selain itu, pihak Dispar juga tidak segan untuk mengkomunikasikan dua arah serta pembinaan kepada pelaku usaha di Kel. Gombengsari

#### 4.2. Hasil Implementasi Pembangunan Kepariwisata Terhadap Perekonomian Daerah Kab Banyuwangi

##### 4.2.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat dampak pertumbuhan ekonomi yang positif, terutama bagi penduduk setempat. Walaupun demikian, peningkatan ekonomi tidak signifikan dirasakan oleh pengusaha wisata di Kel. Gombengsari, tetapi demikian, kehadiran pariwisata bagi masyarakat Gombengsari membawa peningkatan perekonomian mereka. Peningkatan ekonomi masyarakat Kelurahan Gombengsari didapatkan melalui beberapa upaya dan agenda pariwisata yang dilakukan pemerintah melalui Dispar Banyuwangi, seperti kegiatan event pariwisata.

##### 4.2.2. Pengembangan industri kecil dan menengah

sektor ini ada seiring dengan perkembangan wisata di Kel. Gombengsari. Pengembangan wisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Kel. Gombengsari, membawa penduduk setempat untuk membuka industri baru seperti sektor homestay serta produk-produk khas daerah tersebut. Adapun industri yang terbentuk di antaranya kerajinan anyaman bambu, berbagai macam olah keripik, dan produk kopi.



Gambar 3. Industri berbasis industri UKM di wisata Gombengsari

Sumber: Dokumentasi Peneliti 2020

Berdasar hasil penelitian, kemunculan industri kecil dan menengah sangat berpengaruh pada peningkatan perekonomian bagi penduduk setempat. Selain itu, dengan adanya atraksi wisata di Kel. Gombengsari berdampak pada penurunan angka pengangguran. Tetapi beberapa penduduk setempat juga tidak merasakan peningkatan perekonomian dengan alasan kualitas SDM mereka yang mumpuni.

##### 4.2.3. Kausa pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pembangunan Kepariwisata

Kausa pendukung adalah adanya dukungan regulasi dan komitmen Pemkab Banyuwangi. Kausa penghambat dari implementasi ini adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pemerintah maupun penduduk Kel. Gombengsari serta keterbatasan anggaran pelaksanaan implementasi.

#### 5. Kesimpulan

- 1) Implementasi Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Di Kab Banyuwangi
  - A. Indikator komunikasi menjelaskan bahwa Pemkab Banyuwangi telah melakukan proses komunikasi antar pelaku wisata dengan hasil memuaskan. Akan tetapi pelaksanaan komunikasi perlu ditingkatkan lagi dengan penerapan optimalisasi yang baik.
  - B. Dalam indikator sumberdaya, Imasih terdapat kendala disisi SDM dan bujet, namun demikian pada aspek lainnya seperti kewenangan dan sarana prasarana sudah sesuai dan mendukung keberhasilan program ini.
  - C. Indikator Struktur Birokrasi, sudah terjalin dengan baik dengan adanya bebepa aktor yang terlibat. Koodinasi/arahan antar aktor dalam pengembangan pemasaran pariwisata ini bersifat fleeksibel dan 2 arah
  - D. Indikator Disposisi, yaitu adanya dukungan pemerintah kab. Banyuwangi dalam pengembangan wisata di Gombengsari melalui beberapa kegiatan. Tetapi dalam aspek ini masih terdapat hambatan berupa kegiatan pengawasan yang belum terlaksana. Serta, beberapa kegiatan seperti pelatihan belum optimal.
- 2) Hasil Implementasi Pembangunan Kepariwisata Terhadap Perekonomian Daerah kab. Banyuwangi. kemakmuran penduduk setempat meningkat, hal ini dapat dilihat dari angka kemakmuran yang meningkat. Munculnya usaha-usaha industry di sekitar pariwisata dan dikelola langsung oleh warga setempat, sehingga hal ini mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.
- 3) Kausa pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di Kab. Banyuwangi.
  - A. Kausa Pendukung: *dukungan regulasi dan komitmen oleh Pemkab Banyuwangi;*
  - B. Kausa Penghambat: *yakni Keterbatasan SDM pegawai Pemkab dan penduduk setempat dan ketersediaan anggaran dalam proses implementasi*

#### Daftar Pustaka

- Agiomirgianakis, G., Serenis, D., & Tsounis, N. (2017). Effective timing of tourism policy: The Case of Singapore. *Elsavir, Economic Modelling Vol 60, 2017.*



- Alikulova, A. (2014). Tourism Impact on Improvement of Population Welfare in Kazakhstan. *Actual Problems of Economics Journal*.
- Andriyani, I., Husnita, L., & Hardi, E. (2012). Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Pengembangan Wisata Bahari di Kepulauan Sikakap, Kabupaten Mentawai. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan Vol 1, No 2 (2012) STKIP PGRI Sumatera Barat*.
- Bulin, D. (2015). Policies and Strategies for tourism development – Some Lessons for Romania. *Faculty of Finance, Banking and Accountancy Bucharest Journal vol. 7(2)*.
- Dalonso, Y. S., Lourenço, J. M., Remoaldo, P. C., & Netto, A. P. (2014). Tourism Experience, Events and Public Policies. *Annals of Tourism Vol.46*.
- Hwang, J. H., & Lee, S. (2014). The effect of the rural tourism policy on non-farm income in South Korea. *Tourism Management, Elsevier. vol. 46*.
- III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Miles, M. B., Huberman, A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook , Third Edition* . Sage Publications, Inc.
- Oktaviliai, S. (2011). Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal sebagai Upaya Mengatasi Disparitas Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Prosiding SNaPP Vol 2, No.1, Tahun 2011*.
- Sudipa, I. N. (2014). Paradox Of Poverty in Village Ubud,Bali.
- Utama, M. S. (2016). Pengaruh perkembangan Pariwisata Terhadap Kinerja Perekonomian dan Perubahan Struktur Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali.